

BAB II

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

2.1 Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok usia pertumbuhan dan kelompok rentan. Secara umum, MBG tidak hanya dapat dipahami sebagai program pemberian makanan gratis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan bergizi. Sasaran utama Program MBG mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/ sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada tahap awal pelaksanaannya, program ini ditargetkan menjangkau sekitar 19,47 juta penerima manfaat. Sasaran tersebut memperlihatkan bahwa MBG diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan dukungan gizi secara langsung, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dengan demikian, program ini memiliki hubungan erat dengan isu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas generasi muda Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025a).

Dalam perkembangannya, target penerima manfaat MBG kemudian diperluas. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025b) menjelaskan bahwa target penerima manfaat MBG tahun 2025 diarahkan menuju 82,9 juta penerima dan direncanakan dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Perluasan target tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak diposisikan sebagai program terbatas, melainkan sebagai kebijakan nasional berskala besar yang memerlukan kesiapan kelembagaan, sistem distribusi, dan pengawasan yang kuat. Badan Gizi Nasional juga menegaskan optimisme untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat Program MBG hingga akhir 2025. BGN mencatat terdapat 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi aktif, dengan

pertumbuhan rata-rata sekitar 200 unit per hari. Data tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya bergantung pada perluasan sasaran penerima manfaat, tetapi juga pada kesiapan unit layanan yang mampu mendukung proses penyediaan makanan bergizi secara merata (Badan Gizi Nasional, 2025).

2.2 Skala Pelaksanaan dan Tantangan Implementasi Program MBG

Pelaksanaan Program MBG tidak hanya berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, tetapi juga dengan kesiapan sistem operasional di lapangan. Program berskala nasional seperti MBG memerlukan pengelolaan yang kompleks, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi kepada penerima manfaat, hingga pengawasan mutu makanan agar tetap aman dan layak konsumsi. Kompleksitas tersebut menjadi penting karena makanan yang disalurkan dalam Program MBG dikonsumsi oleh kelompok rentan, terutama anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi unsur penting dalam mendukung jalannya Program MBG. SPPG berperan sebagai unit operasional yang berkaitan dengan penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dengan target penerima yang sangat besar, keberadaan SPPG menjadi penopang utama agar makanan dapat disalurkan secara merata. Oleh karena itu, kesiapan dapur, tenaga pelaksana, standar kebersihan, waktu distribusi, serta pengawasan kualitas menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. Selain bertujuan meningkatkan asupan gizi, Program MBG juga memiliki dampak ekonomi karena melibatkan rantai pasok pangan di daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025c) menjelaskan bahwa MBG dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani lokal, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dapur komunitas, dan penyedia jasa katering dalam penyediaan bahan makanan. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal apabila pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan

akuntabel.

Namun, skala pelaksanaan MBG yang luas juga menimbulkan tantangan implementasi. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjangkau penerima manfaat, tetapi juga dengan konsistensi pengawasan, distribusi, dan jaminan mutu makanan di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang dipublikasikan oleh Databoks, yaitu jumlah korban keracunan MBG mencapai 16.109 orang per 31 Oktober 2025 dan tersebar di 26 provinsi. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak cukup dilihat dari besarnya cakupan program, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan di lapangan (Databoks, 2025). Tantangan implementasi tersebut semakin terlihat dari lonjakan kasus keracunan pada beberapa bulan terakhir. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebutkan bahwa lonjakan kasus tertinggi terjadi pada Oktober 2025 dengan 6.823 korban, meningkat dibandingkan September sebanyak 6.052 korban dan Agustus sebanyak 2.226 korban. Menurut JPPI, evaluasi melalui penutupan sebagian dapur belum efektif dalam menekan laju kasus keracunan. Dengan demikian, tantangan implementasi MBG dapat dipahami sebagai persoalan tata kelola program, terutama dalam memastikan pengawasan, distribusi, dan jaminan mutu makanan bagi penerima manfaat (Databoks, 2025).

2.3 Literasi Digital, Opini Publik, dan Relevansi MBG terhadap Citra Presiden

Pembahasan mengenai Program MBG tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dengan cara masyarakat menerima dan menafsirkan informasi tentang program tersebut di ruang digital. Dalam era media sosial, informasi mengenai MBG dapat tersebar dengan cepat melalui berbagai bentuk konten, seperti video TikTok, komentar warganet, potongan berita, maupun unggahan yang memuat kritik terhadap pelaksanaan program. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana persepsi publik terhadap MBG dan Presiden Prabowo

Subianto terbentuk. Literasi digital menjadi faktor penting karena tidak semua pengguna media sosial memiliki kemampuan yang sama dalam memeriksa, memahami, dan mengevaluasi informasi. Dalam penelitian ini, literasi digital dipahami sebagai kemampuan individu dalam mengakses informasi, menilai kredibilitas sumber, membedakan fakta dan opini, serta berhati-hati sebelum membagikan informasi di ruang digital. Kemampuan ini menjadi relevan karena konten mengenai MBG di TikTok tidak selalu hadir dalam bentuk informasi yang utuh dan netral, tetapi dapat berbentuk narasi negatif, kritik, opini pribadi, atau potongan informasi yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan evaluasi kritis masyarakat Indonesia di ruang digital masih belum sepenuhnya kuat. Laporan *Indonesia Makin Cakap Digital 2024* dari BPSDM Komdigi menunjukkan bahwa perilaku berpikir kritis masyarakat dalam merespons informasi digital masih berada di bawah 50%. Hanya 48,1% responden yang mengidentifikasi sumber informasi sebelum membagikannya, 39,2% yang mencari tahu kredibilitas penulis atau sumber, dan 39,8% yang mengetahui kebenaran identitas orang yang ditemui secara daring (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025)

Rendahnya perilaku kritis digital tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat menanggapi isu MBG di TikTok. Pengguna dengan literasi digital yang rendah berpotensi menerima konten negatif secara langsung tanpa memeriksa sumber, konteks, atau kebenaran informasi yang disampaikan. Akibatnya, konten yang belum tentu lengkap atau berimbang dapat membentuk persepsi negatif terhadap Program MBG. Sebaliknya, pengguna dengan literasi digital yang lebih baik cenderung mampu menilai informasi secara lebih hati-hati, membandingkan data dari beberapa sumber, serta tidak mudah terpengaruh oleh konten viral yang bersifat provokatif.

Dalam konteks komunikasi politik, rendahnya literasi digital juga berpotensi memengaruhi citra Presiden Prabowo Subianto. Hal ini karena MBG merupakan salah satu program prioritas yang kuat diasosiasikan dengan kepemimpinan

Presiden Prabowo. Ketika konten negatif mengenai MBG beredar di TikTok, penilaian publik dapat bergerak dari evaluasi terhadap program menuju evaluasi terhadap figur presiden. Dengan demikian, citra Presiden Prabowo tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan secara objektif, tetapi juga oleh bagaimana informasi mengenai kebijakan tersebut dikonstruksi, disebar, dan ditafsirkan di media sosial.

Rujukan mengenai hubungan antara TikTok, opini publik, dan citra politik dapat dilihat dari penelitian *Political Framing: TikTok as Media in Shaping Public Opinion on Presidential Candidates in the 2024 Indonesia Presidential Election*. Indainanto et al. (2025) menunjukkan bahwa TikTok menjadi media strategis dalam membangun citra politik dan memengaruhi opini publik. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut relevan karena konten negatif mengenai Program MBG di TikTok berpotensi tidak hanya membentuk penilaian terhadap program, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Presiden Prabowo sebagai figur yang melekat dengan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, literasi digital memiliki posisi penting dalam penelitian ini. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memeriksa sumber informasi, menilai kredibilitas konten, dan memverifikasi informasi dapat membuat pengguna lebih rentan terhadap pengaruh konten negatif MBG di TikTok. Sebaliknya, literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat membentuk penilaian yang lebih proporsional terhadap Program MBG dan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pembahasan mengenai literasi digital menjadi relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh terpaan konten negatif Program MBG di TikTok dan tingkat literasi digital terhadap citra Presiden Prabowo Subianto.